



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**





Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone pada tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 indikator kinerja yang ada di Dinas Perhubungan 1 indikator memenuhi kriteria *sangat tinggi atau baik sekali*, 4 indikator memenuhi kriteria *tinggi atau baik*, dan 2 indikator memenuhi kriteria *sangat rendah atau sangat kurang* dari target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 28 Januari 2022



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**

Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19621212 198503 1 027





KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum	1
B. Organisasi	3
C. Isu Strategis	7
D. Aspek Strategis Organisasi	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

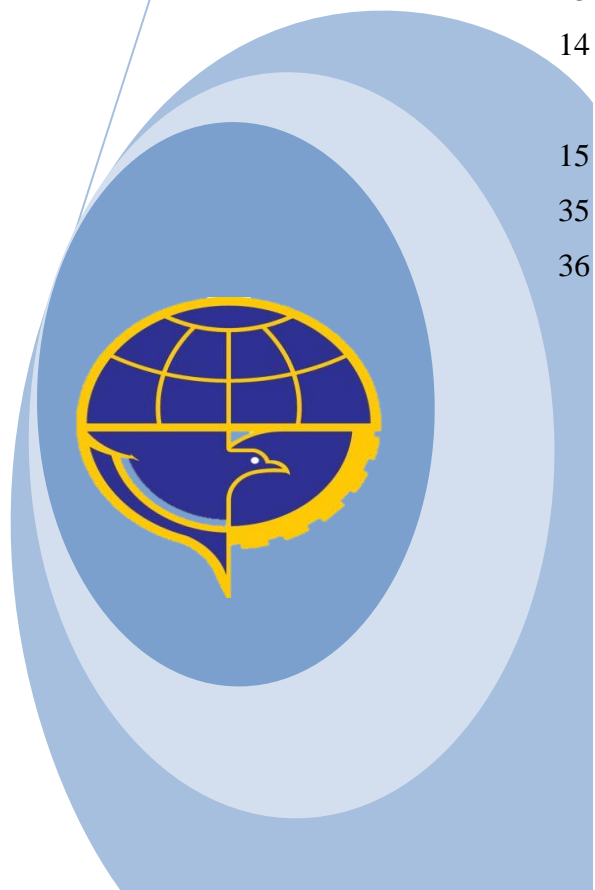
A. Tujuan dan Sasaran	8
B. Strategi dan Arah Kebijakan	10
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Standar Penilaian Kinerja	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	35

BAB IV PENUTUP

36





Tabel 1.1	Potensi Pegawai menurut Jabatan/Status	6
Tabel 1.2	Potensi Pegawai menurut Golongan	6
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023 Sebelum Perubahan	9
Tabel 2.2	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023 Setelah Perubahan	9
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kab. Bone	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Bone	13
Tabel 2.5	Standar Penilaian Kinerja	14
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	19
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya	20
Tabel 3.5	Ikhtisar Pencapaian Kinerja	21
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.7	Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	30
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran	35





Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Bone	5
Gambar 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kab. Bone	11





A. UMUM

Dewasa ini tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi para manajer publik semakin tinggi. Pemimpin atau pejabat-pejabat pemerintahan selalu membutuhkan informasi kinerja manakala berhadapan dengan pihak-pihak lain seperti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD, dengan wartawan berbagai media, dengan lembaga swadaya masyarakat / LSM, dan dengan atasan masing-masing. Penguasaan informasi kinerja oleh pimpinan adalah hal mutlak yang harus ada dalam pikiran pimpinan tersebut ketika harus memberikan informasi kinerja tentang pelaksanaan tugasnya atau kinerja institusi atau unit kerja yang di pimpinnya. Untuk mendapatkan informasi kinerja tersebut haruslah dirancang sistem pengumpulan datanya, sehingga dapat diproduksi laporan-laporan untuk berbagai tujuan.

Laporan kinerja sebagai salah satu laporan yang harus disiapkan baik untuk kepentingan pimpinan atau pihak eksternal instansi, pada saat ini sudah banyak dihubungkan dengan laporan keuangan. Khusus untuk laporan kinerja sebagai sebuah pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja disusun setahun sekali dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan kinerja yang harus disiapkan oleh instansi-instansi pemerintah saat ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja yang periodisasi pelaporannya triwulanan dan tahunan, dan menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim (laporan kinerja interm dilakukan triwulanan dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan.

Laporan kinerja sebetulnya merupakan jendela bagi pihak luar untuk mengetahui kinerja di dalam organisasi instansi yang melaporkannya. Oleh karena itu, jendela itu akan memberikan “kesan pertama” kepada orang yang melihat ke dalam. Jika laporan kerjanya bagus, orang luar tersebut akan berpikir, mungkin saja memang kerjanya bagus. Dan kesan pertama ini akan sangat melekat, jika tidak ditemui hal yang buruk pihak eksternal tersebut pastilah akan mengira semuanya bagus, semua unit kerja bagus, dan seterusnya. Inilah pentingnya sebuah laporan kinerja, informasi kinerja yang ada di dalamnya haruslah diungkapkan dan disajikan secara baik sesuai dengan tanggung jawab pada tingkatannya. Laporan kinerja yang disiapkan dan disampaikan untuk bahan monitoring, tentunya periodisasi pelaporannya berjangka pendek misalnya bulanan atau triwulanan. Akan tetapi, laporan kinerja untuk tujuan pertanggung jawaban cukuplah disusun dan disampaikan setahun sekali. Laporan untuk tujuan monitoring, yang pada akhirnya untuk tujuan pengendalian atas pelaksanaan tugas atau program/kegiatan tertentu, haruslah dapat memicu tindakan pengendalian itu.

Untuk itu laporan kinerja yang demikian biasanya lebih menonjolkan pencapaian-pencapaian target kinerja jangka pendek, terinci, dan merupakan unsur-unsur yang berkontribusi kepada keberhasilan. Pengungkapan dan penyajian analisis celah kinerja (*performance gap analysis*) biasanya dibutuhkan oleh pimpinan atau pihak yang memantau. Jadi, baik laporan kinerja untuk tujuan pemantauan ataupun untuk tujuan pertanggung jawaban menjadi sangat penting karena pada akhirnya itulah informasi-informasi untuk akuntabilitas kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai Misi dan tujuan Organisasi yang dapat bermanfaat antara lain:

- ✓ Merupakan pendorong bagi Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara benar dan baik.

- ✓ Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah tetap terjamin dan terpelihara.
- ✓ Menjadi masukan dan ungkapan baik bagi pihak yang berkepentingan dalam peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Pemerintah Kab. Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah Kab. Bone.

Dan selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan mengalami perubahan SOTK Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten / bertanggung jawab kepada Bupati Bone dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan terutama pada :

- ↳ **Sekretariat**
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- ↳ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**
 - Seksi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- ↳ **Bidang Sarana dan Prasarana**
 - Seksi Pengoperasian Prasarana
 - Seksi Perawatan Sarana dan Prasarana
 - Kelompok Jabatan Fungsional





Berdasarkan dalam Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2021 di atas, maka perlu dipaparkan **Tugas Pokok dan Fungsi** Dinas Perhubungan Kabupaten Bone seperti dibawah ini :

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI

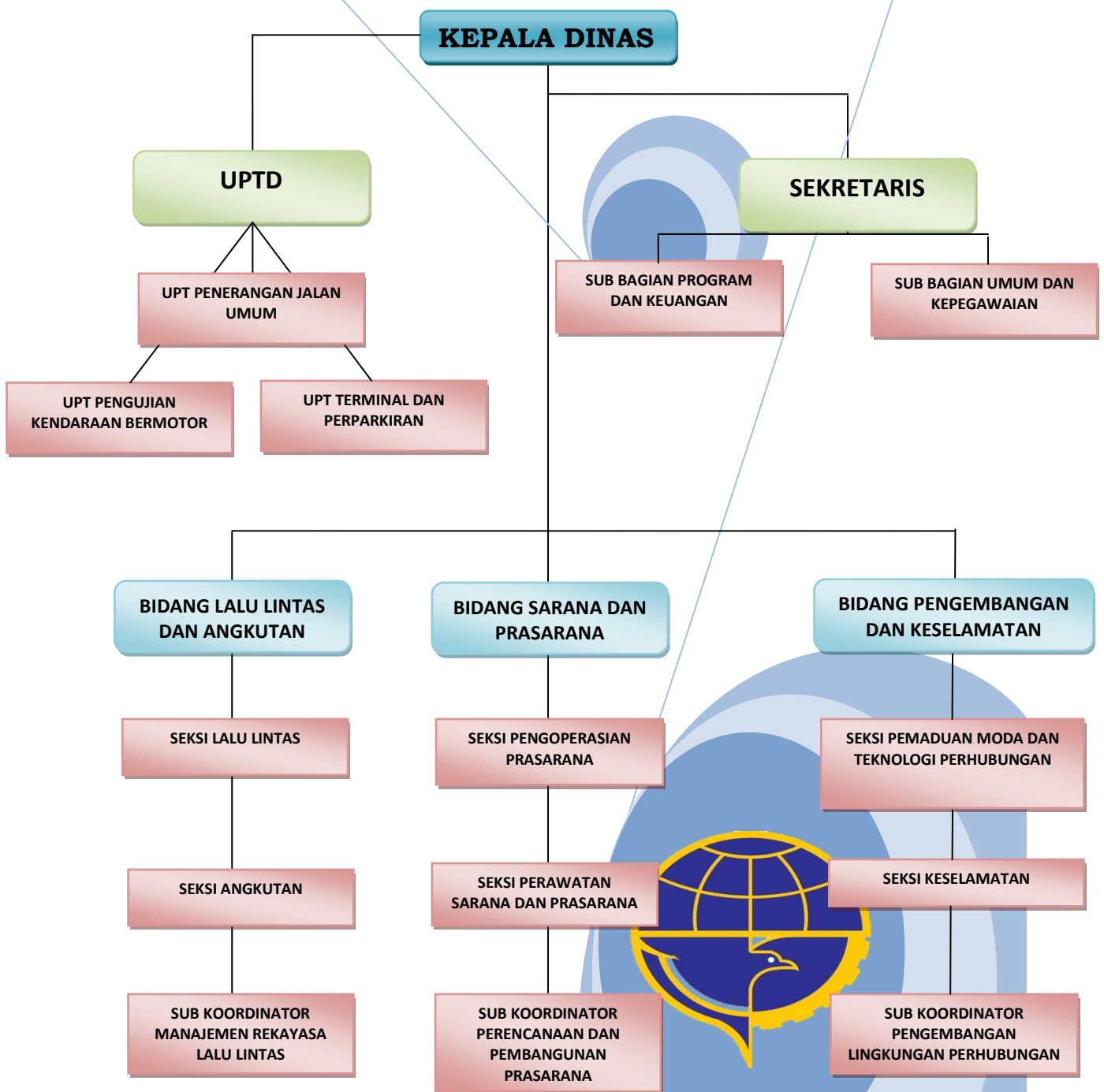
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar. 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Untuk melihat Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2021, silahkan memindai QR Code di samping!

Sumber Daya Aparat

Pemerintah dalam pelaksanaan tugas organisasi sebagaimana Dinas Perhubungan Kab. Bone sangat ditentukan oleh sumber daya yang baik, dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Khususnya sumber daya manusia (Pegawai) merupakan faktor utama dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kab. Bone.

Adapun potensi pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Menurut Jabatan / Status

Tabel 1.1

No	Uraian	Posisi Awal	Tambah	Kurang	Posisi Akhir
1.	Eselon I	-	-	-	-
2.	Eselon II	-	1	-	1
3.	Eselon III	4	-	-	3
4.	Eselon IV	12	2	-	14
5.	Staf	26	-	5	21
6.	Honorer	145	30	-	179
	Jumlah	188	33	5	218

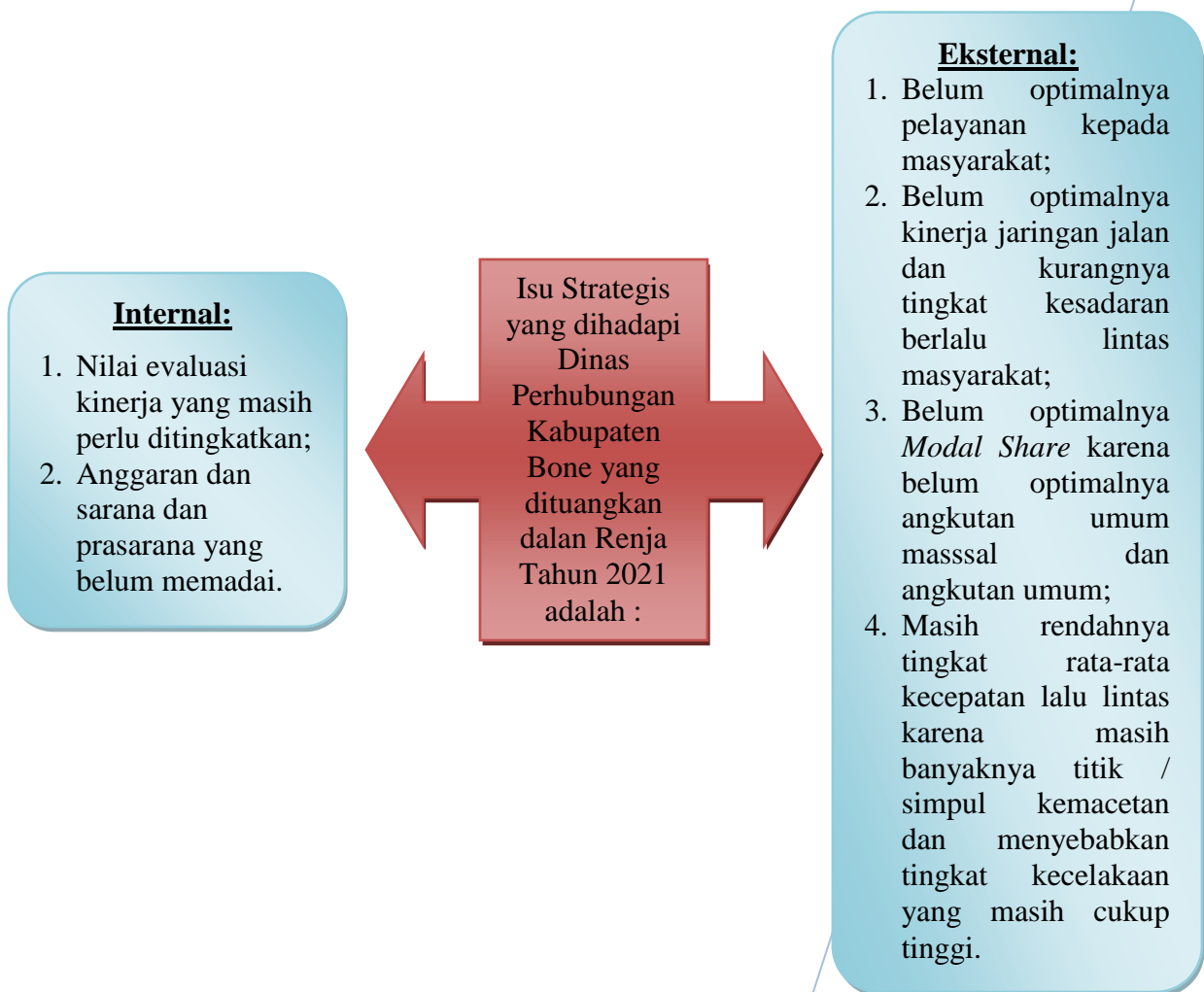
II. Menurut Golongan

Tabel 1.2

No	Uraian	Posisi Awal	Tambah	Kurang	Posisi Akhir
1.	Gol. IV	5	-	1	4
2.	Gol. III	24	-	-	24
3.	Gol. II	15	-	3	12
4.	Gol. I	-	-	-	-
	Jumlah	44	-	4	40



C. ISU STRATEGIS



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2021 adalah :

1. Adanya perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah di bidang LLAJ;
2. Rencana pembangunan bandara dan pengembangan wilayah pasca operasional bandara;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi;
4. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah;
5. Jaringan trayek yang memadai.



AL TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan mengacu pada misi : (1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan (4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan. Maka ditetapkan tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan;
- Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

2. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar.

Tujuan 3 : Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

Sasaran : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.

Tabel. 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018 – 2023

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. - Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat)	B	B	B	BB	A
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. - Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar	Rasio Ijin Trayek (Rasio)	0,0010	0,0015	0,0005	0,0004	0,0002
3.	Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Rasio)	1:75	1:80			
		Pemasangan Rambu-rambu (Unit)	150	50	50	50	50
		Persentase Pelayanan Angkutan (Persen)	60	70	80	90	100
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Persen)	1.810	1.991			
		Persentase Kepemilikan Angkutan Umum (Persen)	60	70	80	90	100

Sumber Data: Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)

Tabel. 2.2
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018 – 2023

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. - Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat)	B	B	B	BB	A
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. - Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar	Rasio Ijin Trayek (Rasio)	0,0010	0,0015	0,0005	0,0004	0,0002
	Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu (Unit)	150	50	50	50	50
		Persentase Pelayanan Angkutan (Persen)	60	70	80	90	100
		Persentase Kepemilikan Angkutan Umum (Persen)	60	70	80	90	100

Sumber Data: Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandate / tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Adapun strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan;
- c. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

2. Arah Kebijakan

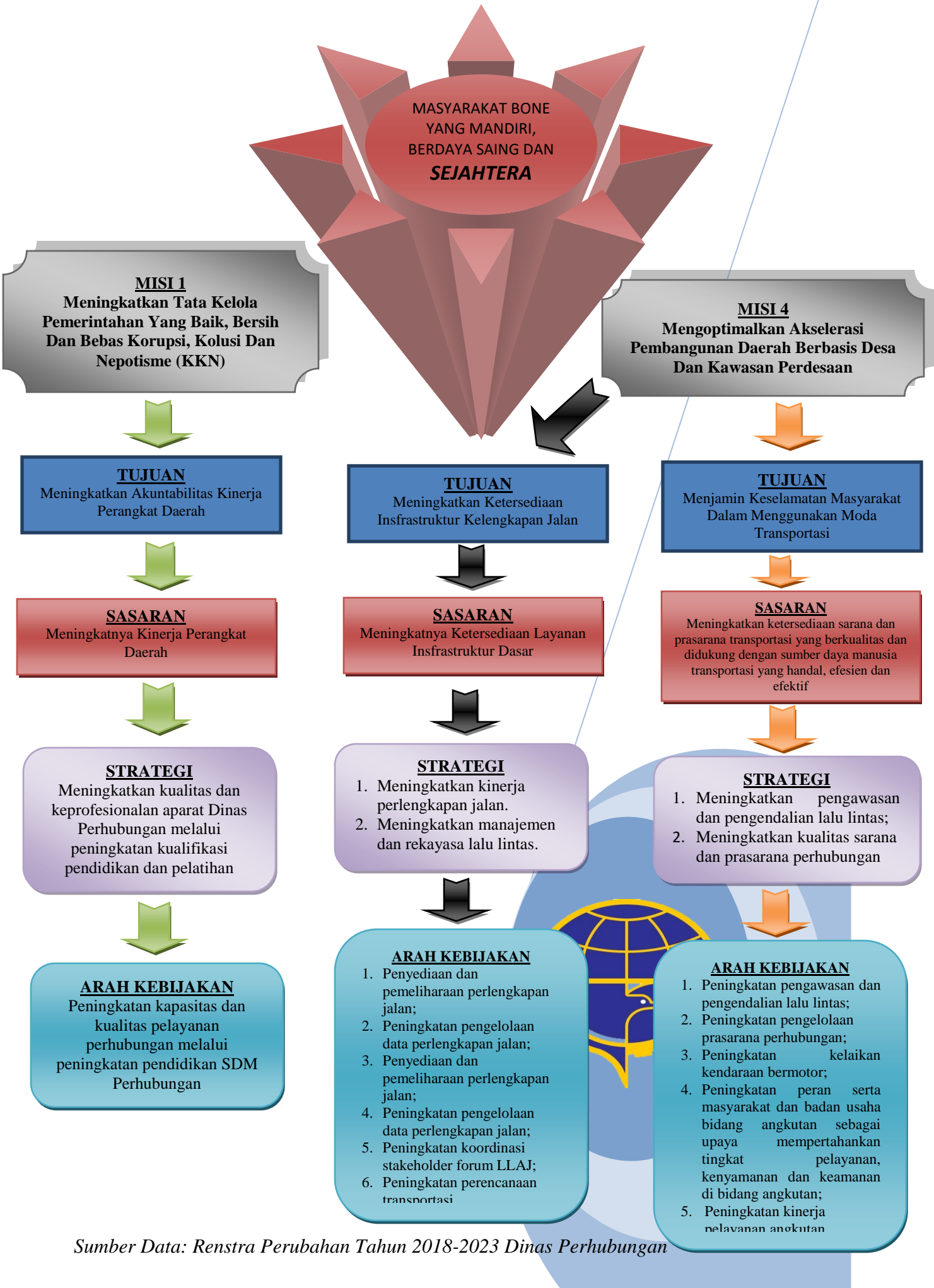
Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun arah kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan perhubungan melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan;
- b. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c. Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan;
- d. Peningkatan koordinasi stakeholder forum LLAJ;
- e. Peningkatan perencanaan transportasi;
- f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- g. Peningkatan pengelolaan prasarana perhubungan;
- h. Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor;
- i. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha bidang angkutan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan di bidang angkutan;
- j. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan.



Untuk melihat Renstra
Perubahan Dishub Kab. Bone
Tahun 2018-2023, silahkan
memindai QR Code di samping!

Gambar 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE



Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 Dinas Perhubungan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. ☞ Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat)	B	B	B	BB	A
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. ☞ Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek (Rasio)	0,0010	0,0015	0,0005	0,0004	0,0002
3.	Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ☞ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu (Unit)	150	50	50	50	50
		Persentase Pelayanan Angkutan (Persen)	60	70	80	90	100
		Persentase Kepemilikan Angkutan Umum (Persen)	60	70	80	90	100

Sumber Data: Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021

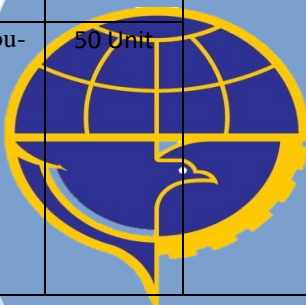
Untuk melihat Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang IKU, silahkan memindai QR Code di bawah ini!



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. ☞ Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.853.190.575
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. ☞ Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	0,0005	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	140.250.000
3.	Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ☞ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	80 %		
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.190 Buah		
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	80 %		
		Pemasangan Rambu-rambu	50 Unit		
Jumlah					6.993.440.575

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Untuk melihat PK Kepala OPD sampai Staf, silahkan memindai QR Code di samping!



E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pengukuran kinerja Dinas dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan / sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan / sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan meliputi :

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator :

⇒ Nilai SAKIP

Sasaran 1.1: Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator :

⇒ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur kelengkapan jalan dasar, dengan indikator :

⇒ Rasio Ijin Trayek

Sasaran 2.1: Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar, dengan indikator :

⇒ Rasio Ijin Trayek

Tujuan 3 : Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi, dengan indikator :

⇒ Pemasangan Rambu-rambu

⇒ Persentase Pelayanan Angkutan

⇒ Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

⇒ Persentase Kepemilikan Angkutan Umum

Sasaran 3.1: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif, dengan indikator :

⇒ Pemasangan Rambu-rambu

⇒ Persentase Pelayanan Angkutan

⇒ Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

⇒ Persentase Kepemilikan Angkutan Umum

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan / sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. ☞ Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	BB	125%	Melampaui Target
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. ☞ Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	0,0005	(Refocusing Anggaran)	-	Belum Mencapai Target
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ☞ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	80 %	50%	62,5%	Belum Mencapai Target
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.190 Buah	(Surat Edaran Kemenhubdat)	-	Belum Mencapai Target
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	80 %	(Surat Edaran Kemenhubdat)	-	Belum Mencapai Target
	Pemasangan Rambu-rambu	50 Unit	(Refocusing Anggaran)	-	Belum Mencapai Target
Rata-rata				31,25	

Sumber Data:

Berdasarkan data di atas, rata-rata indikator kinerja utama adalah 31,25% dimana terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang mempunyai realisasi predikat BB yang masuk dalam kategori “**Sangat Baik**” dengan capaian sebesar 125% (**melampaui target**). 1 (satu) indikator kinerja yang mempunyai realisasi sebesar 50% dengan capaian mencapai 62,5% tetapi masih masuk dalam kategori (**belum mencapai target**).

Dan terdapat 4 (empat) indikator lainnya tidak dapat terealisasi, disebabkan karena adanya refocusing anggaran yang terjadi di dalam lingkup Dinas Perhubungan yang menjadikan keempat indikator kinerja tersebut masuk dalam kategori *belum mencapai target*.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. ☞Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	C	CC	B	BB			75%	100%	125 %		
Meningkatkan ketersediaan infrakstrutur kelengkapan jalan. ☞ Meningkatkan ketersediaan layanan insfrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	0,000 4	0,00 06	0,00 54	(Refocusing Anggaran)				3,6%	-		
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ☞ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	50	50	50	50%			100%	71,42 %	62,5 %		
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	3.171	3.23 0	3.81 5				179%	182,4 0%	-		
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	50	60	70				100%	100%	-		
	Pemasangan Rambu-rambu	16	16					100%		-		

Sumber Data: LkjIP Dinas Perhubungan Tahun 2019,2020

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 masih terdapat beberapa capaian kinerja yang belum memenuhi target, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tujuan 1** : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- Sasaran 1.1** : Meningkatkan kinerja perangkat daerah
- Indikator** : Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur kelengkapan jalan dasar

Sasaran 2.1 : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar

Indikator : Rasio Ijin Trayek

Tujuan 3 : Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif

Indikator : ➤ Pemasangan Rambu-rambu

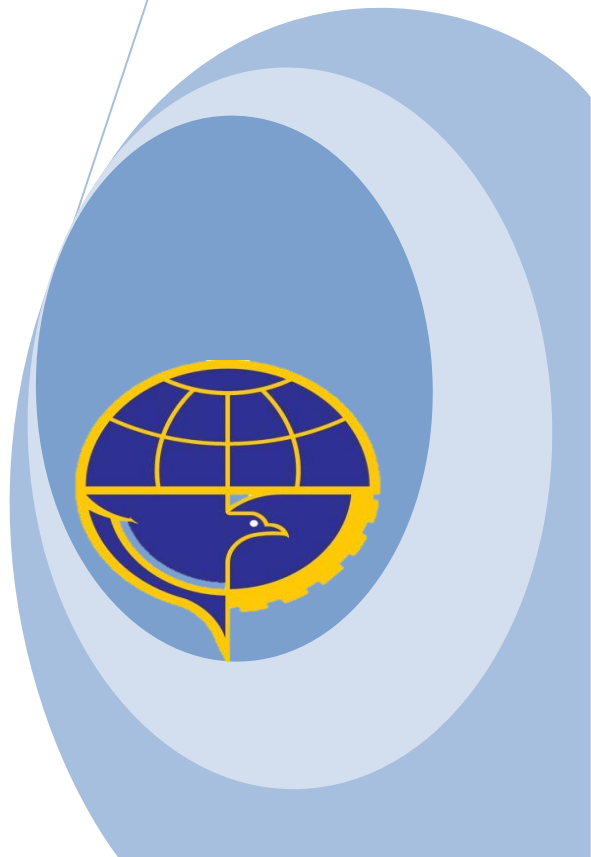
➤ Persentase Pelayanan Angkutan

➤ Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

➤ Persentase Kepemilikan Angkutan Umum

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan / sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.							
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	CC	B	BB		
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan.							
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	0,0002	0,0006	0,0054	(Refocusing Anggaran)		
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi							
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	100	50	50	50%		
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		3.230	3.815	-		
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	100	60	70	-		
	Pemasangan Rambu-rambu	50	16		-		

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan dengan akhir target renstra diatas, menunjukkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 masih mencapai 66,66% persen dari target akhir renstra di tahun 2023. Capaian kinerja hampir mencapai dari target renstra karena kita sudah berada pada 3 (tiga) tahun periode renstra, olehnya masih perlu untuk dilanjutkan kegiatan ini dengan mendorong kinerja perhubungan dengan berbagai kegiatan pendukung untuk mencapai indikator dan sarana / prasarana yang dibutuhkan.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan / sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indicator tujuan / sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
	-	-	-	-	-

Sumber Data:

Berdasarkan tabel realisasi kinerja dan standar pelayanan minimal / standar nasional lainnya di atas, dijelaskan bahwa standar pelayanan minimal / standar nasional lainnya tidak terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan / sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.5
Ikhtisar Pencapaian Kinerja

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d <110	60= \leq s/d <90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. ☞ Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	125	125%	√			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. ☞ Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	-	-				√
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ☞ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	62,5	15,62%				√
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	-	-				√
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	-	-				√
	Pemasangan Rambu-rambu	-	-				√

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bone tahun 2021 dalam kategori *Sangat Berhasil dan Tidak Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa pencapaian tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP menunjukkan

predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 125% yang di dukung oleh sasaran dengan jumlah indikator kinerja Predikat SAKIP oleh APIP yang menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 125%.

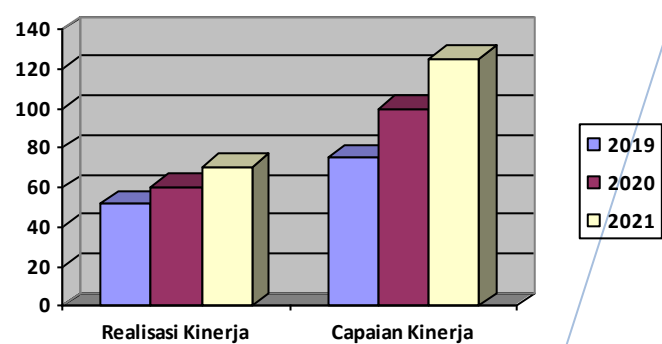
Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- *Indikator 1 : Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP*

Definisi : *Melampaui target.*

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai predikat **BB** atau dengan nilai **70,51** dengan realisasi sebesar **125%** dari target **B**. Hal ini karena :

1. Meningkatnya kualitas data yang terkumpul pada saat penyusunan laporan kinerja.
2. Adanya perbaikan dari sistem akuntabilitas di Dinas Perhubungan.



Pencapaian di atas telah *melampaui target*, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antar bidang di lingkup Dinas Perhubungan
2. Masih kurangnya tenaga ahli di bidang perhubungan sehingga penyajian data kadang tidak efisien

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP antara lain:

1. Mengumpulkan data dan selanjutnya mendorong agar pendukung terkait penerapan SAKIP bisa disampaikan dengan tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja tahun selanjutnya.

Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur kelengkapan jalan dasar.

Sasaran 2.1 : Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar

Dari tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa pencapaian tujuan meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur kelengkapan jalan dasar, dengan indikator Rasio Ijin Trayek menunjukkan predikat *Tidak Berhasil* yang tidak mempunyai nilai capain rata-rata yang di dukung oleh sasaran dengan jumlah indikator kinerja Rasio Ijin Trayek yang menujukkan predikat *Tidak Berhasil*.

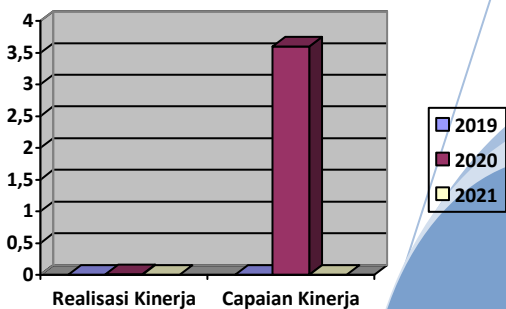
Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- *Indikator 2 : Rasio Ijin Trayek*

Definisi : *Belum mencapai target.*

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator rasio ijin trayek dalam kategori *tidak berhasil*, yaitu tidak tercapainya capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu 0,0005. Hal ini karena :

1. Kurangnya kendaraan yang mengambil ijin trayek di kantor.
2. Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh wabah virus covid 19 yang sementara terjadi.



Pencapaian di atas telah *tidak mencapai target*, dan masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Persyaratan pengambilan surat ijin trayek membutuhkan e-data yang mana tidak semua pemilik angkutan umum memiliki ponsel pintar.
2. Masih kurangnya tenaga ahli di bidang perhubungan sehingga data kadang tidak efisien.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan capaian indikator rasio ijin trayek antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada pemilik angkutan umum.
2. Melakukan revisi terkait prosedur pengambilan surat ijin trayek.

Tujuan 3 : Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

Sasaran 3.1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif

Dari tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa pencapaian tujuan menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi, dengan indikator pemasangan rambu-rambu, persentase pelayanan angkutan, jumlah uji kir angkutan umum, persentase kepemilikan angkutan umum menunjukkan predikat *Tidak Berhasil* yang mempunyai nilai capain rata-rata 15,62% yang di dukung oleh sasaran dengan jumlah indikator kinerja pemasangan rambu-rambu, persentase pelayanan angkutan, jumlah uji kir angkutan umum, persentase kepemilikan angkutan umum yang menunjukkan predikat *Tidak Berhasil* mempunyai nilai capain rata-rata 15,62%.

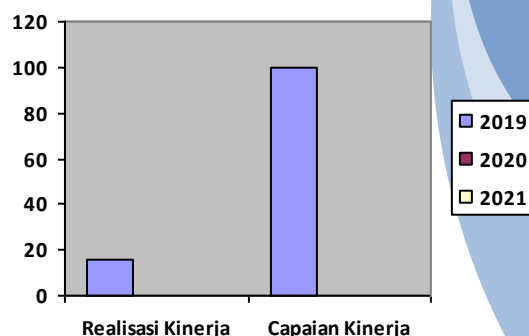
Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- *Indikator 3 : Pemasangan Rambu-rambu*

Definisi : *Belum mencapai target..*

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator pemasangan rambu-rambu dalam kategori *tidak berhasil*, yaitu tidak tercapainya capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu 50 unit. Hal ini karena :

1. Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh wabah virus covid 19 yang sementara terjadi.



Pencapaian di atas telah **tidak mencapai target**, dan masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Pemasangan rambu-rambu tidak terealisasi akibat dari refocusing anggaran yang terjadi.
2. Banyaknya permintaan rambu-rambu dari masyarakat tetapi anggaran kadang tidak mencukupi.

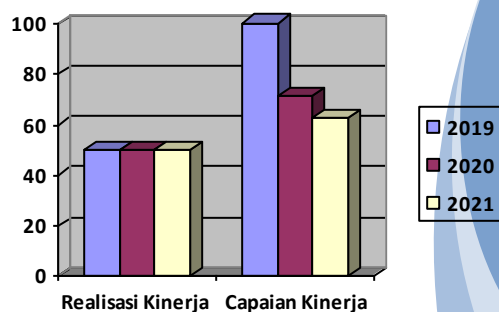
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan capaian indikator pemasangan rambu-rambu antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya fasilitas perlengkapan jalan agar dapat mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan yang terjadi serta menciptakan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas.
 2. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.
- *Indikator 4 : Persentase Pelayanan Angkutan*

Definisi: **Belum mencapai target.**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase pelayanan angkutan dalam kategori **tidak berhasil**, yaitu belum tercapainya capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu 80% yang hanya mencapai 50%. Hal ini karena :

1. Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh wabah virus covid 19 yang sementara terjadi.
2. Kurang optimalnya penyelenggaraan terminal Tipe C.



Pencapaian di atas telah **tidak mencapai target**, dan masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Persentase pelayanan angkutan tidak terealisasi akibat dari refocusing anggaran yang terjadi.
2. Kurang optimalnya penyelenggaraan terminal Tipe C.

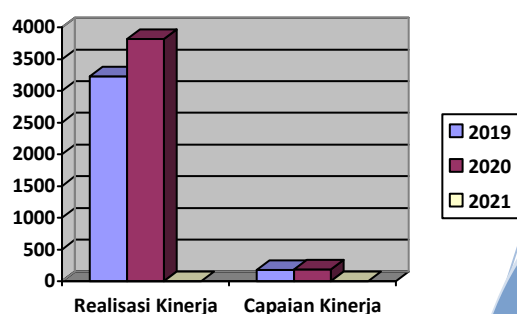
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan capaian indikator persentase pelayanan angkutan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi di bidang keselamatan angkutan umum dan pelayanan prima yang selalu di tingkatkan.
 2. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.
- *Indikator 5 : Jumlah Uji Kir Angkutan Umum*

Definisi : **Belum mencapai target..**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian jumlah uji Kir angkutan umum dalam kategori **tidak berhasil**, yaitu tidak tercapainya capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu 2.190 buah. Hal ini karena :

1. Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh wabah virus covid 19 yang sementara terjadi.
2. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Darat tentang larangan pelaksanaan uji kir pada kabupaten/kota untuk sementara.



Pencapaian di atas telah **tidak mencapai target**, dan masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Darat tentang larangan pelaksanaan uji kir pada kabupaten/kota untuk sementara.
2. Kurangnya tenaga ahli di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan capaian indikator jumlah uji kir angkutan umum antara lain:

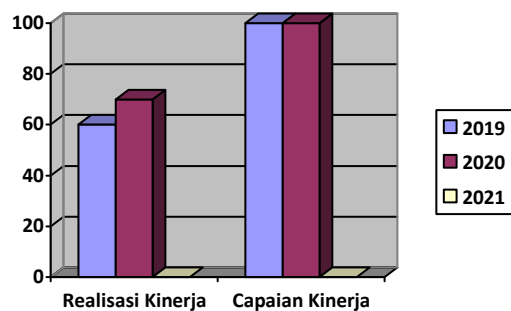
1. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang **Blue KIR**.
2. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

- **Indikator 6 : Persentase Kepemilikan Angkutan Umum**

Definisi : **Belum mencapai target.**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian jumlah uji Kir angkutan umum dalam kategori **tidak berhasil**, yaitu tidak tercapainya capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%. Hal ini karena :

1. Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh wabah virus covid 19 yang sementara terjadi.
2. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Darat tentang larangan pelaksanaan uji kir pada kabupaten/kota untuk sementara.



Pencapaian di atas telah **tidak mencapai target**, dan masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Darat tentang larangan pelaksanaan uji kir pada kabupaten/kota untuk sementara.
2. Kurangnya tenaga ahli di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan capaian indikator jumlah uji kir angkutan umum antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang **Blue KIR**.
2. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.6

Tujuan/ SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	B	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i(e-h)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. ☞ Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	BB	125	100	100	100	25
Meningkatkan ketersediaan infrakstrutur kelengkapan jalan. ☞ Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	100	0	1	100	0	1	0
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ☞ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	80	50	62,5	100	100	100	-37,5
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	100	0	1	100	0	1	0
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	100	0	1	100	0	1	0
	Pemasangan Rambu-rambu	100	0	1	100	0	1	0

Sumber Data:

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 125 % dan capaian anggaran 100 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 100 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 25%.
2. Indikator Rasio Ijin Trayek dengan capaian kinerja 1 % dan capaian anggaran 1%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 0%.
3. Indikator Persentase Pelayanan Angkutan Umum dengan capaian kinerja 62,5 % dan capaian anggaran 100%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 37,5% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 37,5%.
4. Indikator Jumlah Uji Kir Angkutan Umum dengan capaian kinerja 1 % dan capaian anggaran 1%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 0%.
5. Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dengan capaian kinerja 1 % dan capaian anggaran 1%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 0%.
6. Indikator Pemasangan Rambu-rambu dengan capaian kinerja 1 % dan capaian anggaran 1%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 0%.

7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

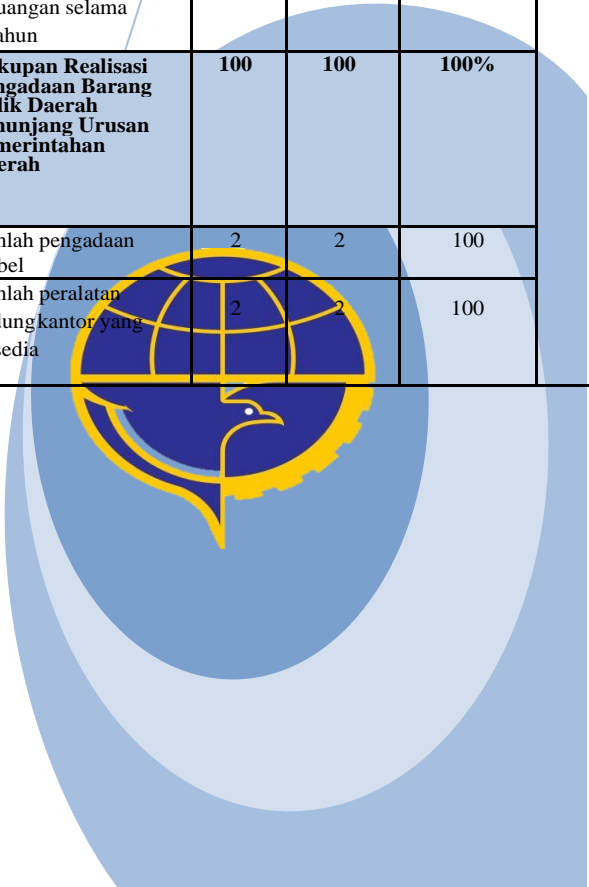
Analisis terhadap program / kegiatan / Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sebagai berikut:



Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	125	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100	100	100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	2	2	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	2	2	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	2	2	100	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	12	12	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	6	6	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	12	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan	1	1	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	4	4	100	

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100	100	100%	Anggaran yang tidak terpakai dikembalikan pada negara
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100.00%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	12	12	100.00%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	24	24	100.00%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	30	30	100.00%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon dan software maintance sesuai rencana kebutuhan	36	36	100.00%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	108	108	100.00%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2	2	100	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2	2	100	



Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	100%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	41	41	100.00%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	12	100.00%	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	100.00%	
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan. Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Ijin Trayek	0	<i>Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Cakupan Ketersediaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	100	100%	
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	100	100	100%	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan	2	2	100.00%	
	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	62,5	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	100	100.00%	
		0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	2	2	100.00%	
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100	100.00%	
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	1	1	100.00%	

Berdasarkan tabel 4.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

TUJUAN 1: MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH.

Sasaran 1.1: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator 1.1.1: Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

dengan target **100%** telah **Berhasil** tercapai sebesar **125%** atau tercapai **125%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TUJUAN 2: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KELENGKAPAN JALAN.

Sasaran 2.1: Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar

Indikator 2.1.1: Rasio Ijin Trayek

dengan target **100%** telah **Tidak Berhasil** tercapai sebesar **0%** atau tercapai **0%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

TUJUAN 3: MENJAMIN KESELAMATAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI

Sasaran 3.1: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.

Indikator 3.1.1: Persentase Pelayanan Angkutan Umum

dengan target **100%** telah **Kurang Berhasil** tercapai sebesar **62,5%** atau tercapai **62,5%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator 3.1.2: Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

dengan target **100%** telah **Tidak Berhasil** tercapai sebesar **100%** atau tercapai **100%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator 3.1.3: Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum

dengan target **100%** telah **Tidak Berhasil** tercapai sebesar **100%** atau tercapai **100%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator 3.1.4: Pemsangan Rambu-rambu

dengan target **100%** telah **Tidak Berhasil** tercapai sebesar **0%** atau tercapai **0%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2021 dengan melalui 6 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu:

TUJUAN 1: MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH.

Sasaran 1.1: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

1. Mengumpulkan data dan selanjutnya mendorong agar pendukung terkait penerapan SAKIP bisa disampaikan dengan tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja tahun selanjutnya.

TUJUAN 2: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KELENGKAPAN JALAN.

Sasaran 2.1: Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar

1. Melakukan sosialisasi kepada pemilik angkutan umum.
2. Melakukan revisi terkait prosedur pengambilan surat ijin trayek.

TUJUAN 3: MENJAMIN KESELAMATAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI

Sasaran 3.1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.

1. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya fasilitas perlengkapan jalan agar dapat mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan yang terjadi serta menciptakan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas.
2. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.
3. Melakukan sosialisasi di bidang keselamatan angkutan umum dan pelayanan prima yang selalu di tingkatkan.
4. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang **Blue KIR**.
5. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 7,045,575,716 (Tujuh Milyar Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan 1			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Sasaran 1.1			
Meningkatnya kinerja perangkat daerah			
Program :			
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.845.325.716	6.318.603.522	100%
Tujuan 2			
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur kelengkapan jalan dasar			
Sasaran 2.1			
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar			
Tujuan 3			
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi			
Sasaran 3.1			
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif			
• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	200.250.000	200.250.000	100%
Total	7.045.575.716	6.518.853.522	



Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone pada tahun 2021 *mengalami penurunan capaian kinerja, karena hanya terdapat 1 indikator yang memenuhi kriteria sangat berhasil atau sangat tercapai, dan 5 indikator lainnya memenuhi kriteria tidak berhasil atau tidak tercapai.*

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone ke depan dan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, diupayakan :

1. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kinerja sarana dan prasarana keselamatan LLAJ;

2. Mengintensifkan koordinasi antara pemerintah daerah Kab. Bone dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
3. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasil guna;
4. Meningkatkan bimbingan dan pelatihan teknis secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bone memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

Bagi instansi di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, 28 Januari 2022



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**

Drs. ENDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19621212 198503 1 027

